

BAB 3

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi ke depan masih bertumpu pada sektor pertanian yang kontribusinya masih dominan terhadap perekonomian. Pentingnya kedudukan sumber daya alam dalam pengembangan wilayah menunjukkan perlunya pengelolaan sumber daya alam secara tepat agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut, maka pengenalan akan potensi yang dimiliki menjadi sangat penting dan strategis untuk pengembangan lebih lanjut, karena dengan mengetahui potensi yang ada, maka dapat memudahkan dalam pemanfaatan dan penataan, sehingga fungsi ekonomisnya dapat diperoleh secara maksimal. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat menjanjikan dimasa depan, karena potensinya demikian besar dan merupakan sektor yang *renewable* dengan pertumbuhan yang relatif konstan, tetapi kontribusinya masih relatif kecil.

Untuk lebih memfokuskan dalam menyusun kerangka kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2015 khususnya dalam kerangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, maka kondisi ekonomi makro Provinsi Jambi menjadi hal yang penting untuk dianalisa agar penyusunan arah kebijakan kedepan memiliki dasar yang kuat dan memiliki implikasi yang positif terhadap penyusunan kerangka perencanaan pembangunan daerah. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan

dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Dari kondisi makro ekonomi dan didukung dengan kerangka pendanaan yang realitis, akan lebih memfokuskan dalam pengalokasian sumberdaya yang didukung penyusunan berbagai kebijakan yang tertuang dalam berbagai program dan kegiatan yang bersinergis dalam kerangka pencapaian visi JAMBI EMAS 2015.

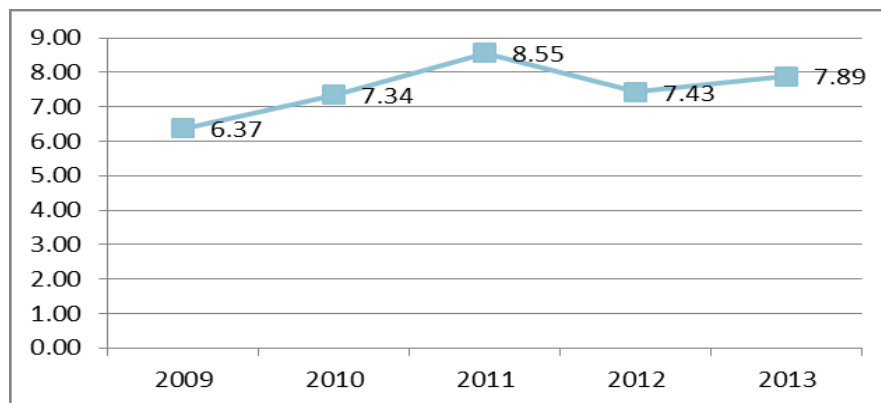
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

Perkembangan perekonomian suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari interaksi aktivitas ekonomi baik dalam skala lokal, regional, nasional dan aktivitas ekonomi internasional yang saling tarik menarik dan memiliki korelasi antar satu dengan yang lainnya. Aktivitas ekonomi yang semakin terbuka dewasa ini, pada akhirnya juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian baik secara nasional maupun internasional, baik itu menyangkut kebijakan pemerintah di sektor moneter maupun sektor riil, maupun pengaruh perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh kondisi keuangan global yang diyakini akan berdampak berbagai aktivitas dan sektor ekonomi di daerah.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2009-2013) menunjukkan kecenderungan meningkat hingga pada tahun 2011, namun mengalami penurunan pada tahun 2012 tetapi kembali

meningkat pada tahun 2013. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dapat dilihat pada **Gambar 3.1**



Gambar 3.1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2009 – 2013 (%)

2. Produk Domesktik Regional Bruto (PDRB)

Selama kurun waktu tahun 2012-2013, Nilai PDRB Provinsi Jambi mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2012 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (AHDB) sebesar Rp.72 Triliyun menngkat menjadi Rp.85 Triliyun pada tahun 2013. Demikian pula nilai PDRB Atas Harga Konstan (ADHK) meningkatkan dari Rp20 Triliyun pada tahun 2012 menjadi Rp21 Triliyun pada tahun 2013.

Selanjutnya melihat distribusi dan peranan sektor ekonomi pada PDRB tahun 2012-2013, struktur pembentuk PDRB Provinsi Jambi masih didominasi oleh 3 (tiga) sektor yang memberikan kontribusi besar. Perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB (ADHB dan ADHK) selama tahun 2012 – 2013 dapat dilihat pada **Tabel 3.1**

Tabel 3.1
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) di Provinsi Jambi Tahun 2012
- 2013 (Juta Rupiah)

Sektor	Tahun 2012		Tahun 2013	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
	%	%	%	%
PERTANIAN	16.64	7.60	17.18	7.41
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	4.64	2.62	8.27	1.56
INDUSTRI PENGOLAHAN	17.43	7.90	15.31	5.69
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	13.87	6.37	22.63	9.27
KONSTRUKSI	28.95	16.16	39.54	20.73
PERDAG., HOTEL & RESTORAN	20.93	9.98	26.75	12.24
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	14.83	7.27	16.82	8.52
KEU. REAL ESTAT, & JASA PERUSAHAAN	14.98	7.81	19.18	7.88
JASA-JASA	9.10	3.85	12.89	4.80

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Tabel 3.2
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar
Harga Berlaku Tahun 2012-2013

No	Sektor	2012	2013
		%	%
1	PERTANIAN	16.64	17.18
2	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	4.64	8.27
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	17.43	15.31
4	LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	13.87	22.63
5	KONSTRUKSI	28.95	39.54
6	PERDAG., HOTEL & RESTORAN	20.93	26.75
7	PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	14.83	16.82
8	KEU. REAL ESTAT, & JASA PERUSAHAAN	14.98	19.18
9	JASA-JASA	9.10	12.89

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2013

PDRB per kapita merupakan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2012 angka PDRB perkapita Atas Dasar harga berlaku mencapai

Rp.56.654 juta Juta dibandingkan dengan PDRB per kapita tahun 2011 sebesar Rp. 49,389 juta yaitu terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, rincian dapat dilihat pada **Tabel 3.3**

Tabel 3.3
PDRB Perkapita Provinsi Jambi tahun 2009 – 2012

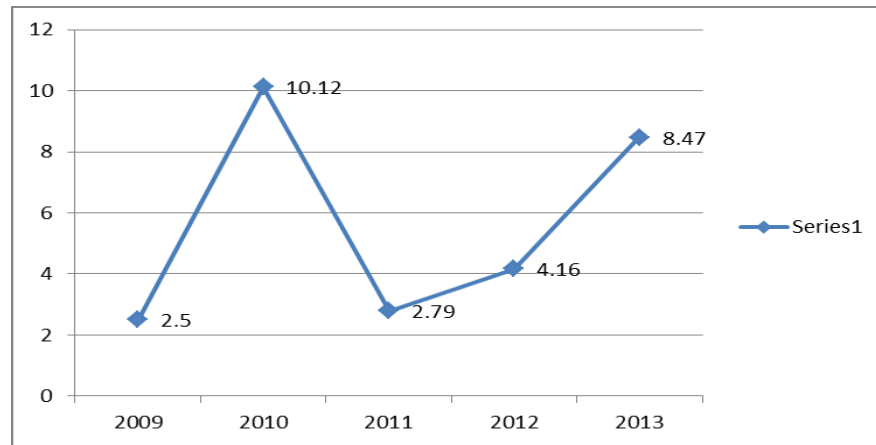
Kabupaten	2009	2010	2011	2012
Kerinci	11,348,078.00	13,377,098.00	14,953,451.00	17,093,240.00
Merangin	9,418,438.00	9,798,304.00	11,296,614.00	12,904,024.00
Sarolangun	14,891,206.00	16,153,487.00	18,489,457.00	20,695,887.00
Batanghari	14,377,838.00	16,058,754.00	19,005,250.00	21,110,177.00
Muaro Jambi	11,108,290.00	11,609,632.00	13,177,643.00	15,120,834.00
Tanjung Jabung Timur	36,079,799.00	43,946,352.00	49,389,222.00	56,654,065.00
Tanjung Jabung Barat	22,014,315.00	24,152,244.00	27,486,747.00	30,640,463.00
Tebo	8,496,276.00	8,796,891.00	10,140,080.00	11,274,429.00
Bungo	12,243,946.00	13,307,567.00	15,303,277.00	17,003,432.00
KotaJambi	16,429,745.00	17,123,768.00	19,381,167.00	22,178,455.00
Kota Sungai Penuh	16,642,691.00	18,451,352.00	20,600,467.00	23,613,004.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

3. Inflasi

Perkembangan inflasi Provinsi Jambi Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, mulai dari tahun 2009-2013 perkembangan inflasi Provinsi Jambi sangat fluktuatif, tetapi cenderung meningkat laju inlasi tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 (*year on year*) sebesar 8.74 % lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 sebesar 4,22 %. Inflasi terjadi disebabkan adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada ; kesehatan dan pendidikan, rekreasi dan olahraga, sandang dan transport, komunikasi dan jasa

keuangan. Perkembangan inflasi di Provinsi Jambi selama tahun 2009-2013 dapat dilihat pada **Gambar 3.2**



Sumber : Bappeda Provinsi Jambi, BPS Provinsi Jambi

Gambar 3.2
Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2009-2013 (%)

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia pada tahun 2014 diprediksi mencapai 6% dengan asumsi konsumsi domestic dan investasi masih bertahan kuat. Angka ini lebih rendah dibandingkan Prediksi pemerintah pada APBN Tahun 2013 sebesar 6.8%. sedangkan prediksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2014 8,0 – 8,5%, saat ini capaian Tahun 2013 mencapai 6.93%.

Dari sisi permintaan, perekonomian terutama didorong oleh meningkatnya ekspor dan konsumsi lembaga swasta nirlaba sementara dari sisi penawaran, pertumbuhan sektor listrik, air, dan gas, sektor industri pengolahan, serta sektor bangunan mampu menjadi pendorong perekonomian Jambi tumbuh pada angka yang tinggi.

Kondisi Provinsi Jambi Tahun 2015 masih terpengaruh oleh kondisi perekonomian dunia dan nasional, dengan tantangan terhadap perekonomian Provinsi Jambi adalah :

- Dampak terbukanya perdagangan bebas dan berlakunya *Asia Economic Community (AEC) 2015*;
- Pembangunan Infrastruktur strategis belum sesuai dengan peran Provinsi Jambi terhadap perekonomian Nasional;
- Dukungan Pemerintah Pusat belum sesuai dengan peran Provinsi Jambi terhadap perekonomian tersebut;
- Semakin meningkatnya kebutuhan terhadap barang inpor bahan baku industry;
- Dampak pengurangan subsidi BBM;
- Kebutuhan Infrastruktur perekonomian daerah semakin meningkat;
- Koordinasi pembangunan antar sektor belum optimal;
- Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam daerah;
- Dampak terjadinya bencana alam global, nasional dan regional;

Peluang yang dapat dimanfaatkan Provinsi Jambi antara lain meliputi :

- Terbukanya peluang pasar ekspor.
- Meningkatnya dukungan Program CSR dan PKBL.
- Meningkatnya pelayanan investasi.
- Tersedianya produk unggulan Provinsi Jambi yang berdaya saing.
- Relatif lebih tingginya upah buruh di Provinsi Jambi

- Provinsi Jambi sebagai penyangga pangan Nasional.
- Meningkatnya pengembangan sumberdaya energy baru terbarukan.
- Tersedianya tenaga kerja berkualitas.
- Komitmen dukungan pengembangan potensi wilayah.
- Rencana adanya relokasi industry.
- Mulai beroperasinya infrastruktur pendukung transportasi.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kinerja keuangan daerah Provinsi Jambi tahun 2015 diperkirakan akan mengalami peningkatan, karena adanya peningkatan pendapatan daerah yang diprediksikan sebesar Rp 3,293,250,798,437.33 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,218,125,069,042.67,- dan perimbangan sebesar Rp 1,713,020,175,394.66,- dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 362,105,554,000.00,-. Sumber pendapatan utama PAD Provinsi Jambi berasal dari pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak bahan Bakar Kendaraan bermotor. Secara rinci perkembangan realisasi dan Proyeksi pendapatan daerah Provinsi Jambi dapat dilihat pada **Tabel**

3.4

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014-2015

Uraian	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target
	2010	2011	2012	2013	2014
PENDAPATAN	1,640,185,857,679.45	2,078,806,913,790.83	2,662,697,133,695.17	2,882,283,411,504.49	2,988,781,416,503.82
PENDAPATAN ASLI DAERAH	686,629,362,314.45	984,232,579,912.83	995,202,289,115.94	1,059,909,111,586.49	979,860,143,413.67
Pendapatan Pajak Daerah	602,355,302,089.00	838,851,529,199.00	808,258,511,161.00	841,884,751,200.00	808,437,579,667.00
Hasil Retribusi Daerah	43,609,630,065.00	10,195,268,389.00	13,405,305,831.00	15,378,708,638.00	17,572,232,700.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12,443,520,362.97	21,703,148,707.92	29,984,605,701.72	26,879,028,620.01	40,000,000,000.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28,220,909,797.48	113,482,633,616.91	143,553,866,422.22	175,766,623,128.48	113,850,331,046.67
DANA PERIMBANGAN	932,205,659,790.00	1,075,207,719,996.00	1,341,202,292,809.23	1,489,849,104,850.00	1,631,447,786,090.15
Bagi Hasil Pajak	423,432,188,790.00	165,268,385,425.00	217,355,131,663.23	246,545,487,350.00	633,754,564,090.15
Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)		301,321,321,571.00	358,785,381,146.00	353,397,069,500.00	
Dana Alokasi Umum	488,743,471,000.00	583,882,413,000.00	731,952,242,000.00	836,578,062,000.00	948,337,712,000.00
Dana Alokasi Khusus	20,030,000,000.00	24,735,600,000.00	33,109,538,000.00	53,328,486,000.00	49,355,510,000.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	21,350,835,575.00	19,366,613,882.00	326,292,551,770.00	332,525,195,068.00	377,473,487,000.00
Pendapatan Hibah	424,875,000.00	1,366,613,882.00	1,908,061,770.00	8,322,445,068.00	1,000,000,000.00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	20,925,960,575.00	18,000,000,000.00	324,384,490,000.00	324,202,750,000.00	376,473,487,000.00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daderah Provinsi Jambi

Kontribusi masing – masing sumber pendapatan daerah Provinsi Jambi dapat dilihat dari porsinya terhadap total pendapatan daerah. Proporsi PAD Provinsi Jambi terhadap total pendapatan daerah dalam kurun waktu 2 tahun 2010 – 2011 cukup tinggi yaitu mencapai 26.74 Persen pada tahun 2010, 28.09 persen pada tahun 2011, terutama dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Dana perimbangan dari pemerintah pusat hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sekitar 15-25 persen dan sisanya berupalain – lain pendapatan yang sah. Kontribusi masing – masing sumber pendapatan daerah Provinsi Jambi dapat dilihat pada **Tabel 3.5**

Tabel 3.5
Persentase Sumber – sumber Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2010-2013

Uraian	2010	2011	2012	2013
PENDAPATAN	26.74	28.09	8.25	13.71
PENDAPATAN ASLI DAERAH	43.34	1.11	6.50	8.57
Pendapatan Pajak Daerah	39.26	-3.65	4.16	6.03
Hasil Retribusi Daerah	-76.62	31.49	14.72	16.01
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	74.41	38.16	-10.36	39.30
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	302.12	26.50	22.44	18.28
DANA PERIMBANGAN	15.34	24.74	11.08	17.72
Bagi Hasil Pajak	-60.97	31.52	13.43	189.39
Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)		19.07	-1.50	-100.00
Dana Alokasi Umum	19.47	25.36	14.29	13.36
Dana Alokasi Khusus	23.49	33.85	61.07	-3.29
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-9.29	1584.82	1.91	11.02
Pendapatan Hibah	221.65	39.62	336.17	0.00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-13.98	1702.14	-0.06	11.06

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, maka kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut :

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka ditetapkan kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2014 meliputi :

- a. Peingkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah.
- b. Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan asset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- c. Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMD.
- d. Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil Pajak, bukan pajak dan pembahasuan data.
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- f. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan DBH Pajak/Bukan Pajak.
- g. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Kebijakan tersebut ditempuh melalui penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan public secara akuntabel, menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan asset-aset agar dapat memberi kontribusi pada PAD, peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.

Dalam rangka mewujudkan senergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2015 serta kontribusi terhadap capaian RPJMN tahun 2015, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung, yang diarahkan untuk :

- a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, termasuk belanja BLUD, DBHCHT dan pendampingan DAK.
- b. Pemenuhan Dana bagi Hasil kepada Kabupten/Kota
- c. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20 % untuk fungsi pendidikan.
- d. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2015.
- e. Mendukung Progeam.kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan.

Belanja daerah Provinsi Jambi selama kurun waktu 3 (tiga) tahun (2012-2014), cenderung mengalami peningkatan baik belanja tidak langsung maupun Belanja Langsung. Secara Proporsi, Belanja Tidak langsung lebih besar dibandingkan Belanja Langsung. Hal tersebut dikarenakan komponen Belanja Tidak langsung tidak hanya untuk Belanja Pegawai, namun juga meliputi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepala Kabupaten/Kota, belanja bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Belanja Tidak Terduga yang kesemuanya bukan merupakan belanja rutin, namun pada hakekatnya merupakan belanja modal atau pembangunan di Kabupaten/Kota serta bantuan langsung kepada masyarakat.

Idealnya prosentase Belanja Langsung lebih besar dari pada Belanja Tidak Langsung, Namun banyak program pembangunan khususnya pembangunan pertanian, pengembangan ekonomi local, penanganan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan pendidikan yang harus ditangani, merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota, sehingga untuk percepatan pelaksanaan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar Kabupten/Kota maka penyediaan anggaran tidak dialokasikan pada belanja langsung, karena alokasi belanja langsung merupakan penyediaan anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Guna membiayai implementasi rencana pembangunan daerah tahun 2015, maka proyeksi kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 3,512,759,341.99 Terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1,862,759,636,341.99 Dan akan dipergunakan untuk belanja pegawai, hibah, bantuan social, bagi hasil kepada kabupaten/kota, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga, 2) belanja langsung sebesar Rp.1,650,000,000,000 akan dipergunakan untuk Program di tiap SKPD, peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD dan belanja Urusan Wajib dan Pilihan.

Secara rinci realisasi dan proyeksi belanja daerah serta rincian belanja tiap tahun urusan kewenangan daerah Provinsi Jambi tahun 2012-2015 dapat dilihat pada **Tabel 3.6**

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 – 2014

No	Uraian	Realisasi		2014
		2012	2013	
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,194,443,789,108.46	1,272,824,844,981.30	1,423,658,204,051.08
1.1	Belanja Pegawai	446,994,502,158.00	435,057,513,299.00	576,852,616,555.03
1.2	Belanja Subsidi	237,500,000.00	0.00	0.00
1.3	Belanja Hibah	338,969,105,252.00	336,276,362,500.00	405,577,980,825.00
1.4	Belanja Bantuan Sosial	32,070,500,000.00	33,521,016,680.00	36,501,900,001.00
1.5	Belanja Bagi Hasil	298,917,433,020.71	315,495,683,322.00	250,000,000,000.00
1.6	Belanja Bantuan Keuangan	74,860,635,677.75	150,386,797,280.30	152,725,706,670.05
1.7	Belanja Tidak Terduga	2,394,113,000.00	2,087,471,900.00	2,000,000,000.00
2	BELANJA LANGSUNG	1,363,635,887,510.00	1,739,414,940,676.24	1,842,184,484,915.19
2.1	Belanja Pegawai	84,157,928,635.00	98,335,159,113.00	103,925,249,606.00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	596,658,216,661.00	703,096,711,897.24	853,581,389,508.90
2.3	Belanja Modal	682,819,742,214.00	937,983,069,666.00	884,677,845,800.29

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

3.2.2.3. Arah kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun – tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/deficit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup deficit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Jambi dari tahun 2012-2014 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dengan jumlah SiLPA cenderung fluktuatif, dan selanjutnya diprediksi akan semakin kecil. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah untuk pembentukan dana cadangan cadangan dan penyertaan modal.

Kebijakan Pembiayaan daerah terdiri dari kebijakan penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk :

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2014 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun anggaran 2015, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional.
- b. Penyertaan Modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*).
- c. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.
- d. Membentuk dana cadangan.

Selengkapnya realisasi dan proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2012-2015 dapat dilihat pada

Tabel 3.7

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Provinsi Jambi
Tahun 2012-2014

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah		
	2012	2013	2014*
Penerimaan Pembiayaan Daerah	632,401,128,102.12	690,767,077,096.83	283,338,396,117.86
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	631,825,442,526.85	690,767,077,096.83	283,338,396,117.86
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	575,685,575.27	0.00	
Pengeluaran Pembiayaan daerah	46,251,508,082.00	50,564,087,560.00	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	40,000,000,000.00	50,130,000,000.00	
Pembayaran Pokok Utang	6,251,508,082.00	434,087,560.00	
Pembiayaan Netto	586,149,620,020.12	640,202,989,536.83	283,338,396,117.86
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan	690,767,077,096.83	510,246,615,383.78	6,277,123,655.41

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sumber Pendanaan pembangunan lainnya yang diterima Pemerintah Provinsi Jambi adalah Anggaran Pendapatan belanja Negara (APBN), berupa Dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan. Besarnya APBN yang diterima Pemerintah Provinsi Jambi setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Jumlah alokasi dana APBN yang diterima Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2012-2014 menurut Kementerian/Lembaga, dapat dilihat pada

Tabel 3.8

Tabel 3.8
Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan
Bersama) Provinsi Jambi Tahun 2010-2013

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	2010 (000)	2011 (000)	2012 (000)	2013 (000)
1	Kementerian Dalam Negeri	18,421,196	22,293,404	31,132,999	118,356,285
2	Kementerian Pertanian	72,233,534	156,416,413	198,019,822	238,726,153
3	Kementerian Perindustrian	2,358,385	2,391,170	2,855,871	10,763,000
4	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1,000,000	1,000,000	1,384,879	1,293,923
5	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	401,292,237	277,771,430	115,558,378	14,924,647
6	Kementerian Kesehatan	39,454,769	30,145,021	35,551,419	296,857,294
7	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	39,249,857	32,552,246	33,197,743	53,056,978
8	Kementerian Sosial	13,621,441	14,869,053	16,320,035	21,132,505
9	Kementerian Kehutanan	2,121,870	4,177,542	4,701,710	4,601,904
10	Kementerian Kelautan dan Perikanan	12,775,753	21,387,175	24,317,937	15,340,677
11	Kementerian Pekerjaan Umum	38,195,418	43,390,970	74,445,491	69,711,182
12	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2,353,000	9,554,400	2,150,000	3,311,500
13	Kementerian Lingkungan Hidup	500,000	500,000	3,801,388	5,765,650
14	Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah	2,983,594	5,846,432	4,513,580	7,272,594
15	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	8,970,450	3,388,605	2,387,858	1,521,196
16	Badan Koordinasi Penanaman Modal	150,000	300,000	500,000	500,000
17	Arsip Nasional Republik Indonesia	95,259	134,417	134,417	154,417
18	Kementerian Perdagangan	1,584,564	1,599,564	2,089,686	2,360,182
19	Kementerian Perumahan Rakyat		1,246,536		
20	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	5,788,260	5,074,462	4,416,097	5,504,899

21	Kementerian Negara Pemberdayaan Masyarakat				1,584,677
22	Kementerian Negara PPN/Bappenas			931,290	931,290
	Total Dana APBN	663,149,587	634,038,840	558,410,600	873,670,953

Sumber : Bappeda Provinsi Jambi

Kebijakan keuangan daerah, baik arah kebijakan pendapatan, pembiayaan, maupun belanja yang didukung dengan kebijakan keuangan Negara, yang tertuang dalam APBD Provinsi jambi maupun APBN adalah mendukung tercapainya target sasaran perencanaan Pembangunan Provinsi Jambi